

BAHAS SEKTOR PERTANIAN, GUBERNUR GORONTALO MINTA OMBUDSMAN BANTU PERCEPAT KEMAJUAN DAERAH

Selasa, 07 Desember 2021 - Nungky Febrianawati

GORONTALO, iNews.id - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie membahas sektor pertanian bersama Ombudsman. Rusli meminta agar Ombudsman Republik Indonesia dapat membantu secara aktif percepatan kemajuan Gorontalo. "Kami ingin eksistensi Ombudsman lebih dioptimalkan, agar masyarakat lebih paham tugas Ombudsman dan berpartisipasi, serta ikut merasakan kehadiran Ombudsman," ujar Rusli usai bertemu dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika di Gorontalo, Selasa (7/12/2021).

Pada pertemuan itu, Rusli Habibie dan Yeka membahas produksi jagung sebagai branding Provinsi Gorontalo. Rusli menjelaskan masyarakat Gorontalo sudah terbiasa mengonsumsi jagung dari zaman kerajaan, bahkan masyarakat juga mengonsumsi beras campur jagung.

"Sebagai upaya mempertahankan produksi jagung dan sektor pertanian, pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun irigasi sawah dengan tujuan menciptakan 10.000 hektare (ha) lahan cetakan sawah. Saat ini sudah tercipta 2.000 ha pencetakan sawah," ucap Rusli. Rusli mengatakan bahwa dahulu masyarakat Gorontalo yang berprofesi di bidang peternak juga mendominasi, tetapi kini beralih profesi ke bidang pertanian.

Dia menjelaskan, sektor pertanian di daerah itu mengalami kendala, yaitu pengadaan bibit dan pupuk dilakukan secara nasional.

"Dahulu pengadaan tersebut diserahkan ke daerah, sehingga dilakukan dengan menyesuaikan potensi daerah, jenis tanah, masa tanam masing-masing daerah. Selain itu, saat ini tidak ada lagi insentif pertanian jagung," jelasnya. Menanggapi sinergi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyambut baik harapan Gubernur Gorontalo tersebut.

"Kami terbuka dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan sinergitas dengan Ombudsman. Kami harap koordinasi dapat dilakukan secara intensif antar kedua lembaga, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal," katanya.

Yeka menambahkan, bahwa pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada daerah agar pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap dinamika masyarakat di daerah.